



IMPLEMENTASI KELAYAKAN ANGGARAN BUMDES DI KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO

Oleh:

NASRULLAH, MUHAMMAD NUR ABDI, SARTINA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl. Sultan Alaudin No 259 Makassar
email : mnurabdi@unismuh.ac.id
No. HP 085255286451

ABSTRACT

The Village Fund allocation is very important in order to finance the development of disadvantaged areas in a development area system. The implementation of the Village Fund Allocation is aimed at physical and non-physical programs related to Village development indicators, which include education level, community income level, and health level. One of the rational reasons why there is a need for Village Fund Allocation (ADD) is because the village is positioned as the basis for decentralization. The ADD policy is very relevant to the perspective that places the village as the basis for participation, because the village is directly facing the community and community control is stronger.

This study aims to determine the implementation of the Bumdes budget feasibility in accordance with the type of business program, and to determine the implementation of the Bumdes program in managing the budget allocated in the Tarowang sub-district, Jeneponto Regency.

This research was obtained from several observations and interviews with related parties, this type of research is descriptive qualitative by selecting several informants. The data source used is the primary data source that is information sourced from direct observation of the research location by observation and interview. While secondary data sources are data sources obtained from documentation or literature studies to supplement primary data.

Field research data collection through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the Bumdes budget suitability in accordance with the type of business program in the Tarowang sub-district of Jeneponto district is considered feasible, but the implementation of the Bumdes program in managing the budget allocated in the Tarowang sub-district is less than optimal because of the lack of capabilities and human resource skills.

Keywords: *Bumdes, Bumdes program Implementation*

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa begitu penting guna untuk pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tersebut di tujukan untuk program-program fisik dan nonfisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan Desa, yang meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Salah satu alasan rasional mengapa perlu adanya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah karena desa ditempatkan sebagai basis Desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan Desa sebagai basis partisipasi, karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan kontrol masyarakat lebih kuat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kelayakan Anggaran Bumdes sesuai dengan program jenis usaha, dan untuk mengetahui pelaksanaan program Bumdes dalam mengelola anggaran yang di alokasikan dikecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

Penelitian ini diperoleh dari beberapa observasi dan wawancara dengan pihak terkait, jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan memilih beberapa informan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan langsung kelokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan untuk melengkapi data-data primer.

Pengumpulan data field research melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kelayakan anggaran Bumdes sesuai dengan program jenis usaha dikecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto itu sudah termasuk layak, akan tetapi pelaksanaan program Bumdes dalam mengelola anggaran yang dialokasikan dikecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto kurang maksimal karena kemampuan dan keterampilan SDMnya yang kurang. Kata Kunci: Bumdes, pelaksanaan Program Bumdes

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa sebagai bagian dari wilayah dari sebuah Kabupaten, memiliki otonomi asli. Walaupun dalam batasan otonomi asli, Desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumber daya alam (tanah, air, hutan) dan sumber daya sosial.

Pemerintah desa sebagai satuan pemerintahan terendah memegang peran garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam undang-undang mengatur bahwa pemerintah desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Masyarakat desa memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perubahan-perubahan baik dibidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Namun perubahan-perubahan itu diharapkan tetap sesuai dan tidak meninggalkan tata nilai sosial budaya yang ada di desa, seperti kekerabatan, gotong royong, dan kearifan (Zaenuri, Atmojo, and Iqbal 2019).

Menunjang anggaran Desa tersebut, akan ada alokasi dana cukup besar yang mengalir ke Desa. Pada pasal 72 ayat (4) ditetapkan paling sedikit 10% dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan mengalir ke Desa. Berdasarkan simulasi anggaran, setiap Desa rata-rata akan menerima Rp.800.000.000-1,4 milyar. (Wahyu 2019)

Alokasi Dana Desa begitu penting guna untuk pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tersebut di tujukan untuk program-program fisik dan nonfisik yang berhubungan dengan indikator

perkembangan Desa, yang meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Salah satu alasan rasional mengapa perlu adanya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah karena desa ditempatkan sebagai basis Desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan Desa sebagai basis partisipasi, karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan kontrol masyarakat lebih kuat. Sebagian masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga Desentralisasi di tingkat Desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.(Adi Winata, Sanjaya, and Astana 2020)

Alokasi Dana Desa, berpeluang untuk mengelola pengembangan program-program usaha pemerintahan dan sosial kemasyarakatan secara mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang di berikan kepada Desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memicu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis(Tengah 2020).

Kebijakan berupa Desentralisasi fiskal ke Desa ini menunjukkan bentuk keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat akan prioritas peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dana tersebut dapat di gunakan sebagai modal program jenis usaha Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sesuai pasal (87-90) pada UU No 6/2014 dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif Rakyat Desa.(Supriyati and Bahri 2020)

Pengembangan basis ekonomi perdesaan di jalankan pemerintah melalui berbagai program, tapi upaya tersebut belum membuahkan hasil memuaskan seperti di inginkan bersama. Banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya berbagai program itu. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di perdesaan, maka kepemilikan lembaga itu oleh Desa di kontrol bersama di mana tujuan utamanya meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat(Hamdani and Yudiardi 2020).

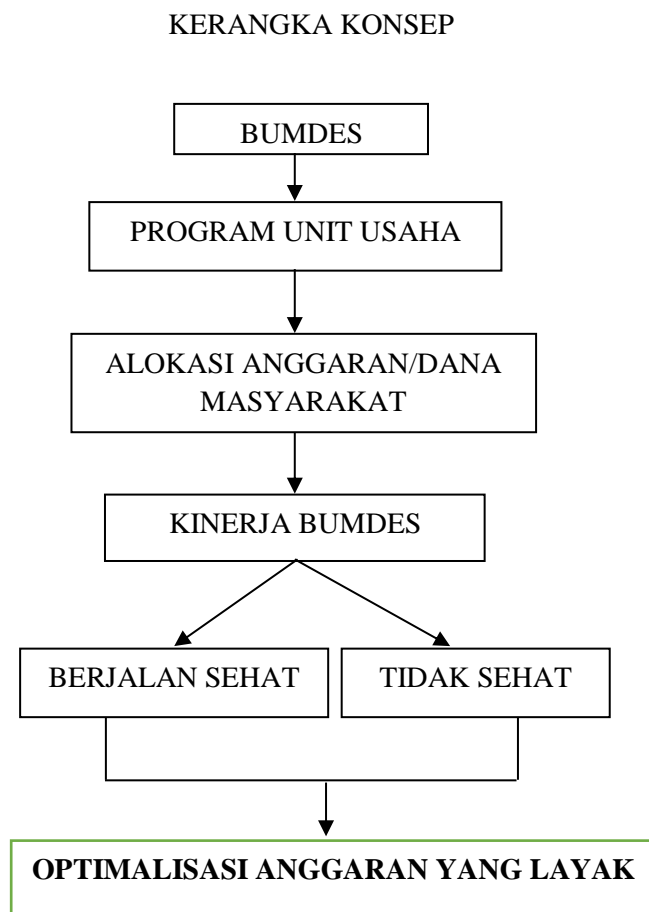
Pelembagaan Bumdes untuk pemberdayaan dan penggerakan potensi ekonomi Desa, bertujuan untuk mendukung kebijakan Makro pemerintah (UU) No.32/2004) dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya di pedesaan. Pemberdayaan Bumdes secara melembaga di tingkat Desa di harapkan dapat menstimulus masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan mensejahterakan desa-desa mereka(Karim, Musa, and Sahabuddin 2020).

Karena Bumdes dapat menjadi wadah bagi pemerintah Desa untuk memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di Desa. Dengan itu, masyarakat di harapkan dapat menjadi masyarakat yang mandiri dengan berwirausaha (Zamzami et al. 2020)

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ini pemerintah desa berharap dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dan memperkuat ekonomi Desa dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Namun dalam proses sosialisasi program kepada masyarakat, pemilihan calon pengurus Bumdes, perencanaan program, pembentukan sampai dengan pelaksanaan program tersebut tentu masyarakat dan pemerintah desa akan menemukan rintangan-rintangan(Wibowo 2020).

Kerangka Pikir/ Kerangka Konsep

Secara sederhana, kerangka pemikiran dalam penelitian ini ditunjukkan dengan bagan sebagai berikut:



II. METODE PENELITIAN

Teknik Analisis

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pengumpulan data seorang peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang banyak, apabila peneliti mampu menerapkan metode observasi, wawancara, atau berbagai dokumen yang berhubungan dengan subjek yang diteliti.

2. Display data atau penyajian Data

Penyajian data yang diperoleh kedalam sejumlah matrix atau daftar kategori setiap data yang didapat, penyajian data biasanya digunakan berbentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan dan penarikan kesimpulan masih dapat diuji kembali dengan data dilapangan, dengan cara merefleksikan kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat, triangulasi sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

ALOKASI DANA DESA

NO	NAMA DESA	ADD	ANGGARAN BUMDES
1	Desa Balang Loe	± 2 milyar	4 %
2	Desa Tino	± 2 milyar	5 %
3	Desa Bonto Ujung	± 775 juta	1 %

Sumber data : Kepdes

1. Fokus Kelayakan Anggaran Bumdes

Pertama peneliti menanyakan kepada bapak Budi Ashar sebagai kepala desa Balang Loe, berapakah anggaran untuk Bumdes?

Informan menjawab :

“Anggaran untuk Bumdes desa Balang Loe adalah sebanyak Rp.100.000.000 (**BA,15 Oktober**)”

Kemudian peneliti bertanya lagi apakah anggaran tersebut sudah cukup untuk membuka sebuah usaha ?

Kemudian informan menjawab :

“ Kalau misalnya dengan dana hanya segitu dengan banyak program yang ingin di jalankan, menurut saya itu tidak cukup” (**BA,15 Oktober**)

Kemudian peneliti bertanya lagi apa alasannya sehingga bapak mengatakan bahwa anggaran segitu tidak cukup ?

Kemudian informan menjawab :

“ Alasannya seperti yang kita ketahui bahwa di jaman sekarang kan apa-apa serba mahal, jadi kalau membuka usaha dengan modal 100 juta dengan banyak program itu tidak cukup. Tarulah buka usaha Tani, usaha simpan pinjam, usaha ternak, itu sangat tidak cukup “(**BA,15 Oktober**)

Kemudian peneliti bertanya berapakah anggaran untuk setiap program Bumdes ?

informan menjawab:

“Karena di Bumdes Desa Balang Loe masih memiliki satu program usaha jadi anggarannya itu Rp.100.000.000” (**BA, 15 Oktober 2019**)

Kemudian peneliti bertanya lagi apakah karena program usahanya hanya satu maka segitu juga anggarannya atau bagaimana ?

Kemudian informan menjawab :

“ Sebenarnya program usaha Bumdes Balang Loe itu banyak, cuman karena banyak yang tidak jalan sehat karena beberapa hal akhirnya satu persatu program stop sampai disitu, dan akhirnya hanya satu yang berjalan dan kita fokus disitu “(**BA,15 Oktober**)

Kemudian peneliti bertanya lagi apa harapan Bapak supaya Bumdes Balang Loe yang dulunya banyak program tapi sekarang hanya satu yang tersisa ?

Kemudian informan menjawab :

“Harapan saya adalah bagaimana supaya pemerintah lebih memperhatikan hal-hal yang perlu di perhatikan, misalnya meningkatkan kreatifitas masyarakat, karena alasan juga mengapa program Bumdes tidak berjalan karena kurangnya pengetahuan pengelola Bumdes” (**BA,15 Oktober**)

Kemudian kedua peneliti bertanya kepada bapak Darwis sebagai kepala desa Tino, berapakah anggaran untuk Bumdes ?

Informan menjawab:

“Anggaran untuk Bumdes desa Tino adalah sebanyak Rp.126.700.000” (**DS 15 Oktober 2019**)

Kemudian peneliti bertanya lagi apakah anggaran tersebut sudah cukup untuk membuka sebuah usaha ?

Kemudian informan menjawab :

“ Menurut saya Alhamdulillah sudah cukup, karena dari dana tersebut kami bagi tiga, dan pembagian banyak tidaknya itu tergantung dari usaha yang dimiliki “(**DS 15 Oktober 2019**)

Kemudian peneliti bertanya lagi apa yang membedakan sehingga setiap usaha memiliki anggaran yang berbeda ?

Kemudian informan menjawab :

“Jadi yang membedakan itu kita lihat mana usaha yang bahan utamanya itu mahal di pasaran, misalnya usaha pengelolaan air kita anggarkan lebih banyak, karena membutuhkan modal yang banyak pula” **(DS 15 Oktober 2019)**

Kemudian peneliti bertanya berapakah anggaran untuk setiap program Bumdes ?

informan menjawab:

“Untuk jenis usaha pengelolaan air bersih kita anggarkan sebanyak Rp. 61.700.000, usaha keterampilan dan jasa sebanyak Rp. 15.000.000, Kemudian usaha tani sebanyak Rp.50.000.000”**(DS,15 oktober 2019)**

Kemudian peneliti bertanya lagi dari tiga usaha tersebut mana yang paling membantu masyarakat?

Kemudian informan menjawab :

“ Menurut saya semuanya membantu masyarakat, tapi yang paling membantu masyarakat itu usaha Tani karena kan pada umumnya masyarakat bekerja sebagai petani dan itu sangat membantu ketika harga bahan tani itu melonjak naik “

Kemudian kedua peneliti bertanya kepada bapak Sarro Rimbu sebagai kepala desa Bonto Ujung, berapakah anggaran untuk Bumdes ?

Informan menjawab:

“Jadi Bumdes Sipitangarri itu tiga kali penambahan modal, modal awal itu sebanyak Rp.25.000.000, kemudian kedua Rp.75.000.000, dan yg ketiga Rp.50.000.000. jadi total anggarannya itu sebanyak Rp.150.000.000”**(SR, 16 Oktober 2019)**

Kemudian peneliti bertanya lagi apakah penambahan modal tersebut terus terjadi setiap tahunnya atau bagaimana ?

Kemudian informan menjawab :

“ Iya jadi penambahan modal itu terus terjadi, apalagi usaha kita kan bergerak dibidang fashion, jadi seiring dengan berkembangnya waktu misalnya pakaian-pakaian pengantin itu terus saja berubah trandnya” **(SR, 16 Oktober 2019)**

Kemudian peneliti bertanya lagi jika seperti yang bapak katakana tadi bahwa trandnya terus berubah, apakah seperti hal tersebut tidak akan mengalami kerugian ?

Kemudian informan menjawab :

“ Kalau berbicara soal kerugian yah pasti adalah sedikit, kalau seprti itu kan kita memang harus menanggung resikonya” **(SR, 16 Oktober 2019)**

Kemudian peneliti bertanya berapakah anggaran untuk setiap program Bumdes ?

informan menjawab:

“Kan program Bumdes desa Bonto Ujung itu masih memiliki satu jenis usaha jadi total anggarannya itu Rp.150.000.000”**(SR, 16 Oktober 2019)**

Kemudian peneliti bertanya lagi jika terus saja mengalami penambahan modal, mengapa tidak mengusulkan untuk membuat program baru lagi ?

Kemudian informan menjawab :

“ Bukannya kita tidak ingin membuat program baru atau program yang lama yang tidak berjalan di bangun lagi, akan tetapi kita juga melihat kinerja-kinerja yang mengelola di bidang tersebut “(**SR, 16 Oktober 2019**)

Kemudian peneliti bertanya lagi jadi sampai sekarang belum ada yang namanya pelatihan ketenagakerjaan ?

Informan menjawab :

“Belum ada, jadi dalam musyawarah kerja kemarin itu baru di usulkan untuk ada yang namanya pelatihan ketenagakerjaan, dan insyaa Allah semoga secepatnya direalisasikan” (**SR, 16 Oktober 2019**)

Kemudian peneliti bertanya kepada bapak karaeng Siga sebagai ketua Bumdes desa Balang Loe, ada berapa jenis usaha yang di kelola kemudian jenis usaha apa sajakah yang terdapat di dalamnya?

Informan menjawab:

“Jenis usaha Bumdes desa Balang Loe itu ada satu, yang bergerak di bidang simpan pinjam”(KS,16 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya lagi apakah dengan usaha simpan pinjam tersebut bisa membantu masyarakat ?

Kemudian informan menjawab :

“ Iya sejauh ini sangat membantu, dimana masyarakat yang betul-betul membutuhkan pinjaman yang sudah kepepet, yang mungkin mereka sudah pinjam kesana kemari tapi belum juga di dapatkan, maka disinilah kita sebagai sosok Bumdes yang ada di bagian tersebut ”(KS,16 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya lagi apakah ada kriteria orang-orang yang akan di pinjami tersebut atau ada jangka waktunya untuk melunasi utangnya tersebut ?

Kemudian informan menjawab :

“ Untuk kriteria tidak ada, semua di sama ratakan yang mau pinjam di gunakan untuk apa kita tetap kasih, dan soal jangka waktunya tetap kita kasih batas waktu, cuman bedanya dengan tempat pinjam di luar sana disini tidak ada yang namanya riba, kalau soal kebijakan yah mungkin masih bisa di toleransi “(KS,16 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya bagaimana seharusnya dana yang dianggarkan agar semua program usaha bisa berjalan ?

Informan menjawab:

“Kalau menurut saya yah lebih banyak anggaran yang di anggarakan lebih bagus lagi, karena dengan itu kita bisa membuat usaha kita lebih berkembang lagi”(KS, 16 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya lagi apakah dengan banyaknya anggaran bisa membantu membuka usaha baru ?

Kemudian informan menjawab :

“ Kalau pemerintah belum memberikan pelatihan untuk para SDM menurut saya itu tidak meyakinkan bagi saya, karena di Bumdes kami ini bukan hanya terkendala di modal tapi SDMnya itu sendiri, sehingga membuat usaha yang dulunya lancar akhirnya jadi stop “(KS, 16 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya lagi apakah Bapak yakin bahwa untuk lebih memajukan Bumdes orang-orang yang ahli atau orang-orang yang berkompeten dalam bidang tersebut ?

Kemudian informan menjawab :

“Saya yakin sekali, kenapa saya mengatakan seperti itu karena walaupun banyak anggaran jika yang mengelola Bumdes tersebut tidak berkompeten maka Bumdes tersebut sama saja tidak ada nyawanya. Jadi modal dengan SDM itu sama-sama saling melengkapi” (KS, 16 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya kepada bapak Nasir sebagai ketua Bumdes desa Tino, ada berapa jenis usaha yang di kelola kemudian jenis usaha apa sajakah yang terdapat didalamnya?

Informan menjawab:

“Jenis usaha Bumdes desa Tino itu ada tiga, jenis usaha yang pertama usaha pengelolaan air bersih, keterampilan dan jasa, dan usaha Tani”(NR,15 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya bagaimana seharusnya dana yang dianggarkan agar semua program usaha bisa berjalan ?

Informan menjawab:

“Kalau menurut saya modal sebanyak Rp.126.700.000 sudah cukup banyak untuk usaha yang di rintis sekarang, tapi kalau ingin membuat progam baru seharusnya lebih banyak lebih bagus lagi”(NR,15 oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya lagi apakah jika seandainya pemerintah menganggarkan dana yang cukup banyak apakah pengelola Bumdes mampu untuk membuka usaha baru ?

Kemudian informan menjawab :

“Jadi begini kami belum bisa memutuskan secara sepihak tanpa harus memusyawarakannya terlebih dahulu, karena walaupun banyak anggaran tapi yang akan mengelola usaha tersebut tidak ada atau tidak berkompeten maka sama saja kita membuang-buang dana, jadi alangkah bagusnya kita mengadakan yang namanya pelatihan” (NR,15 oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya kepada ibu Siti Kasmawati sebagai ketua Bumdes desa Bonto Ujung, ada berapa jenis usaha yang di kelola kemudian jenis usaha apa sajakah yang terdapat di dalamnya?
Informan menjawab:

“Jenis usaha Bumdes desa Bonto Ujung itu ada satu, tapi didalamnya berbagai macam yang bergerak dibidang fashion seperti peralatan pengantin, lamming, baju pengantin, tenda, foto/shooting, dan electone”(SK, 15 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya bagaimana seharusnya dana yang dianggarkan agar semua program usaha bisa berjalan ?

Informan menjawab:

“Kalau menurut saya lebih banyak yang di anggarkan lebih bagus lagi, tapi untuk menjalankan usaha yang sekarang ini saya kira sudah cukup banyak bagi saya”(SK, 15 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya lagi mengapa ibu mengatakan bahwa dana tersebut sudah cukup banyak, sedangkan seperti yang saya lihat bahwa usaha tersebut membutuhkan dana yang cukup banyak ?

Kemudian informan menjawab :

“Saya mengatakan ini cukup banyak karena setiap tahunnya selalu ada yang namanya suntikan dana, jadi bukan cuman ini saja yang terus berputar modalnya, tapi aka nada terus suntikan dana masuk “(SK, 15 Oktober 2019)

2. Fokus Pelaksanaan Program Bumdes

Kemudian peneliti bertanya kepada bapak Budi Ashar sebagai kepala desa Balang Loe, apakah program Bumdes sudah berjalan dengan baik dengan dana yang telah dianggarkan ?

Informan menjawab:

“Sejauh ini menurut data yang saya dapatkan Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dengan dana yang yang telah di anggarkan tersebut, walaupun seperti kita ketahui setiap usaha itu pasti ada kendalanya”(BA, 15 oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya lagi bagaimana sistem pelaksanaan Bumdes apakah sudah transparan dan sudah terukur akuntabilitasnya ?

Kemudian informan menjawab :

“Iya jadi dalam pelaksanaan Bumdes itu baik dari segi kegiatannya atau dari segi anggarannya itu tidak ada yang ditutup-tutupi, jadi semuanya terukur mulai dari pertanggungjawaban secara teknis maupun administratif”(BA, 15 oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya kepada bapak Darwis sebagai kepala desa Tino, apakah program Bumdes sudah berjalan dengan baik dengan dana yang telah dianggarkan ?

Informan menjawab:

“Sesuai data yang kami dapatkan dan yang kami pantau program usaha yang sekarang di jalankan itu sudah berjalan dengan baik, sisa bagaimana kita mengembangkannya”(DS, 15 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya lagi bagaimana sistem pelaksanaan Bumdes apakah sudah transparan dan sudah terukur akuntabilitasnya ?

Kemudian informan menjawab :

“Iya jadi sudah bersifat transparan, terutama ketika diadakan laporan pertanggungjawaban semua tokoh-tokoh masyarakat di undang untuk menyaksikan berapa keuntungan dan berapa pengeluaran dalam Bumdes. Kemudian soal akuntabilitasnya jadi sengaja kita buat spanduk atau baliho kita pajang ditempat umum supaya orang-orang tau berapa anggaran dana desa dan berapa anggaran Bumdes”(DS, 15 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya kepada bapak Sarro Rimbu sebagai kepala desa Bonto Ujung, apakah program Bumdes sudah berjalan dengan baik dengan dana yang telah dianggarkan ?

Informan menjawab:

“Untuk saat ini Alhamdulillah berjalan dengan baik, apalagi usaha ini kan bergerak dibidang fashion, jadi kita ikuti sesuai perkembangan zaman, jadi tetap kita suntikkan dana”(SR,16 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya lagi bagaimana sistem pelaksanaan Bumdes apakah sudah transparan dan sudah terukur akuntabilitasnya ?

Kemudian informan menjawab :

“Jadi di Desa itu sudah ada yang namanya prinsip-prinsip salah satunya yang di pertanyakan tadi ada transparansi dan akuntabilitas, jadi kita memang diwajibkan untuk menampilkan di tempat umum mulai dari dana desa, dana Bumdes. Jadi semuanya sudah terukur dan tidak ada yang perlu di sembunyikan lagi “(SR,16 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya kepada bapak karaeng Siga sebagai ketua Bumdes di desa Balang Loe, ada berapa jenis usaha yang berjalan?

Informan menjawab:

“Jenis usaha yang berjalan di Bumdes desa Balang Loe itu ada satu”(KS,16 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya jika dalam satu program usaha ada yang memiliki keuntungan lebih, apakah pengelola menambahkan modal utamanya atau membuat program usaha baru?

Informan menjawab:

“Kalau menurut saya ditambahkan saja modal utamanya dulu untuk lebih mengembangkan usaha yang di jalankan, karena untuk membuat program baru itu tidak mudah”(KS 16 oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya lagi apa alasannya sehingga Bapak mengatakan bahwa membuka usaha baru itu tidak mudah ?

Kemudian informan menjawab :

“Membuat usaha baru kan perlu adanya rancangan terlebih dahulu, ada juga yang dikatakan hak membangun, jadi semuanya harus dibicarakan terlebih dahulu. Dimulai dari pengalokasian dananya, pengelolanya, usaha apa saja yang di bangun dll” **(KS 16 oktober 2019)**

Kemudian peneliti bertanya kepada bapak Nasir sebagai ketua Bumdes di desa Tino, ada berapa jenis usaha yang berjalan ?

Informan menjawab:

“Jenis usaha yang berjalan di Bumdes desa Tino itu ada tiga”**(NR, 16 oktober 2019)**

Kemudian peneliti bertanya jika dalam satu program usaha ada yang memiliki keuntungan lebih, apakah pengelola menambahkan modal utamanya atau membuat program usaha baru?

Informan menjawab:

“Kalau menurut saya tergantung dari berapa pendapatan yang di peroleh, kalau misalnya cukup untuk membuka usaha baru yah kita bisa buka usaha baru walaupun itu usaha kecil-kecilan yang penting bisa membantu masyarakat”**(NR 16 oktober 2019)**

Kemudian peneliti bertanya lagi jika Bumdes desa Tino membentuk usaha baru lagi, usaha apa saja yang akan di bentuk ?

Kemudian informan menjawab :

“Kan di Desa kami rata-rata petani rumput laut, jadi kita punya rancangan untuk membangun sebuah gudang rumput laut, jadi masyarakat hanya menjual rumput lautnya disitu, supaya bukan dari luar yang beli rumput laut tersebut” **(NR 16 oktober 2019)**

Kemudian peneliti bertanya kepada ibu Siti Kasmawati sebagai ketua Bumdes di desa Bonto Ujung, ada berapa jenis usaha yang berjalan ?

Informan menjawab:

“Jenis usaha yang berjalan di Bumdes desa Tino itu ada satu”**(SK, 15 oktober 2019)**

Kemudian peneliti bertanya jika dalam satu program usaha ada yang memiliki keuntungan lebih, apakah pengelola menambahkan modal utamanya atau membuat program usaha baru ?

Informan menjawab:

“Kalau menurut saya lebih baik kita menambahkan saja modal utamanya karena membuka usaha baru itu tidak gampang, mending usaha ini saja dulu dikembangkan”**(SK, 15 oktober 2019)**

Kemudian peneliti bertanya kepada bapak Hasanuddin sebagai bendahara Bumdes desa Balang Loe, apa saja kendala pengelolaan Bumdes sehingga ada program usaha yang tidak berjalan ?

Informan menjawab :

“Dulu waktu kepala desa sebelumnya menjabat kendalanya itu di modal, karena pemerintah belum terlalu memperhatikan, tapi sekarang Alhamdulillah dengan pemerintahan yang baru lambat laun semua sudah bisa di kendalikan, selain itu juga Bumdes kan masih sosok yang baru masih banyak orang-orang yang belum paham, jadi kendalanya juga terdapat pada SDMnya”(HD,15 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya, tindakan apa yang dilakukan jika ada program usaha yang tidak berjalan sehat ?

Informan menjawab:

“Tindakannya itu dengan cara mengadakan pertemuan dalam bentuk musyawarah, perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat agar mereka mengetahui pentingnya partisipasi dalam program Bumdes untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian desa”(HD, 15 oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya lagi jika dalam suatu musyawarah terdapat suatu kesepakatan apakah selalu mendapatkan solusi, kemudian solusinya itu seperti apa, apakah bisa terjadi pergantian pengurus atau bagaimana ?

Kemudian informan menjawab :

“Iya kalau pada saat musyawarah selalu mendapatkan suatu solusi, tapi kalau soal pergantian pengurus tidak pernah pemerintah mengganti pengurus selama masa kepengurusan selesai ”(HD, 15 oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya kepada bapak Said sebagai bendahara Bumdes desa Tino, apa saja kendala penegelola Bumdes sehingga ada program usaha yang tidak berjalan ?

Informan menjawab :

“Kendalanya yang pertama itu dari modal, kemudian kedua kurangnya pengetahuan pengurus dalam manajemen Bumdes sehingga kinerja kelembagaan Bumdes dalam pengembangan usaha kurang optimal”(SA,15 oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya, tindakan apa yang dilakukan jika ada program usaha yang tidak berjalan sehat ?

Informan menjawab:

“Yang pertama itu kita mengadakan musyawarah dengan mendatangkan aparat yang terlibat seperti penasehat dan pengawas atau para pengelola Bumdes”(SA, 15 oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya lagi jika dalam suatu musyawarah terdapat suatu kesepakatan apakah selalu mendapatkan solusi, kemudian solusinya itu seperti apa, apakah bisa terjadi pergantian pengurus atau bagaimana ?

Kemudian informan menjawab :

“Solusinya itu yang terlibat dibidang tersebut kita Tanya permasalahannya di mana, apa kendalanya. Tapi kalau soal pergantian pengurus tidak pernah, akan tetapi kalau dia yang ingin mengundurkan diri yah apa boleh buat” **(SA, 15 oktober 2019)**

Kemudian peneliti bertanya kepada ibu Subaeda sebagai bendahara Bumdes desa Bonto Ujung, apa saja kendala pengelola Bumdes sehingga ada program usaha yang tidak berjalan ?

Informan menjawab :

“Kendalanya itu biasa pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan, jadi bisa memicu usaha tersebut tidak berjalan dan akhirnya stop sampai disitu. Kemudian kedua itu kendala terbesarnya ada pada SDMnya karena kurangnya pelatihan jadi yang mengelola dalam bidang tersebut tidak mahir”**(SE,15 Oktober 2019)**

Kemudian peneliti bertanya, tindakan apa yang dilakukan jika ada program usaha yang tidak berjalan sehat ?

Informan menjawab:

“Pertama itu dengan melakukan musyawarah dibahas apa yang menjadi kendala sehingga usaha tersebut tidak berjalan, kemudian yang kedua perlu melakukan pelatihan keterampilan/atau diklat tentang manajemen Bumdes kepada pengurus agar meningkatkan kinerja kelembagaan Bumdes sehingga usahanya semakin berkembang”**(SE,15 Oktober 2019)**

Kemudian peneliti bertanya lagi jika dalam suatu musyawarah terdapat suatu kesepakatan apakah selalu mendapatkan solusi, kemudian solusinya itu seperti apa, apakah bisa terjadi pergantian pengurus atau bagaimana ?

Kemudian informan menjawab :

“Iya kalau pada saat musyawarah selalu mendapatkan suatu solusi, tapi kalau soal pergantian pengurus tidak pernah pemerintah mengganti pengurus selama masa kepengurusan selesai”**(SE,15 Oktober 2019)**

Pembahasan Penelitian

Bumdes di kecamatan Tarowang di bentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal desa, meningkatkan kondisi perekonomian dan pendapatan asli desa. Dari hasil penelitian implementasi kelayakan anggaran Bumdes, ternyata di masing-masing Bumdes yang peneliti wawancarai ternyata anggarannya itu layak dikatakan layak karena rata-rata usaha yang dijalankan tersebut berjalan dengan sehat, walaupun ada yang hanya memiliki satu sampai tiga jenis usaha, tapi semuanya bisa di kendalikan. Yang menjadi permasalahan disini adalah kurangnya pengetahuan pengurus dalam manajemen Bumdes, sehingga kinerja kelembagaan Bumdes dalam

pengembangan usaha kurang optimal. Menurut pendapat yang peneliti wawancarai bahwa tingkat pengetahuan masyarakat desa rendah terkait pentingnya membentuk kelompok usaha (Fahmi* 2019).

Dari sekian informan yang peneliti tanyakan tentang bagaimana seharusnya dana yang dianggarkan agar program usaha bisa berjalan, namun jawaban mereka hampir sama yaitu semakin banyak semakin bagus lagi, karena dengan begitu kita bisa membuat program usaha baru lagi. Namun mereka juga mengatakan bahwa dengan dana yang mereka dapatkan itu sudah cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Kalau untuk membuat program baru lagi untuk mendapatkan suntikan dana itu gampang, akan tetapi yang dipikirkan sekarang itu bagaimana supaya perlu diadakan pelatihan keterampilan/diklat tentang manajemen Bumdes kepada pengurus agar meningkatkan kinerja kelembagaan Bumdes sehingga usahanya makin berkembang, selain itu sosialisasi terhadap masyarakat juga diperlukan agar mereka mengetahui pentingnya partisipasi dalam program Bumdes untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian desa. Tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat desa yang rendah serta pola pikir masyarakat yang belum terbuka sehingga kesulitan mengubah mindset seseorang untuk memulai kelompok usaha banyak potensi desa yang seharusnya bisa di kelola dengan baik, tetapi hanya di biarkan karena keengganan para masyarakat untuk memulai menjalankan usaha. Usia Bumdes di kecamatan Tarowang rata-rata lebih dari setahun sejak didirikan. Beberapa sistem masih belum berjalan dengan baik dalam kegiatan Bumdes, bukan karena permasalahan modal akan tetapi kurang efektifnya antar unit usaha dan lintas desa. Sejauh di buatkannya program kegiatan Bumdes harus di dasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, Bumdes di bangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada enam prinsip-prinsip yaitu:

- a. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam Bumdes harus melaksanakan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam Bumdes pun bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang bisa mendorong kemajuan usaha Bumdes.
- c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam Bumdes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha Bumdes harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun secara administrative.
- f. Sustainable, seluruh kegiatan usaha Bumdes harus dapat dikembangkan serta dilestarikan oleh masyarakat desa dalam wadah Bumdes.

IV. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa, Implementasi Kelayakan Anggaran Bumdes di Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto layak untuk membuka jenis usaha. Perlu adanya pelatihan keterampilan/diklat tentang manajemen Bumdes kepada pengurus agar meningkatkan kinerja kelembagaan Bumdes sehingga usahanya makin berkembang. Pengelolaan Bumdes di laksanakan berdasarkan pada prinsip kooperatif, transparansi, partisipatif, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme keanggotaan dasar dan self help yang diterapkan secara mandiri dan profesional.

Selain itu juga, perlunya sosialisasi terhadap masyarakat agar mereka mengetahui pentingnya partisipasi dalam program Bumdes untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian desa.

Saran

1. *Bumdes diKecamatan Tarowang harus bisa meningkatkan lagi pendapatan asli desa pada tahun seterusnya dengan mengembangkan usaha yang sudah ada dan membuat usaha baru.*
2. *Bumdes dikecamatan Tarowang diharapkan bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat kedepannya.*
3. *Bumdes dikecamatan Tarowang diharapkan bisa lebih mencibtakan tenaga pekerja ahli yang kreatif dan berkompeten.*

Daftar Pustaka

- Adi Winata, I Gusti Ketut, Ni Made Wulan Sari Sanjaya, and I Gusti Made Oka Astana. 2020. "Entrepreneurship Orientation and Holistic Marketing Mix in Creating Competitive Advantages Bumdes." *Journal of Business on Hospitality and Tourism* 6(2): 87.
- Fahmi*, Roni. 2019. "Tanggung Gugat Direksi BUMD Atas Keputusan Yang Merugikan Keuangan BUMD." *Airlangga Development Journal* 3(1): 72.
- Hamdani, N.A., and D. Yudiardi. 2020. "Planning for the Development of Village-Owned Enterprises (BUMDes)." *Advances in Business, Management and Entrepreneurship* (April): 817–21.
- Karim, A, C I Musa, and M A Romansyah Sahabuddin. 2020. "Regional Economic Growth the Role of BUMDes Institutions in Enrekang Regency." *Researchgate.Net* (November). https://www.researchgate.net/profile/Abdul_Karim35/publication/345433994_Regional_Economic_Growth_the_Role_of BUMDes_Institutions_in_Enrekang_Regency/links/5fa69624a6fdc06241ce7f8/Regional-Economic-Growth-the-Role-of-BUMDes-Institutions-in-Enrekang-Regen.
- Supriyati, and Ramadhan S. Bahri. 2020. "Model Design of Accounting Information Systems for Village Owned Enterprises (BUMDes)." *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 879(1).
- Tengah, Kampar Kiri. 2020. "Neneng Salmiah 1 , Satria Tri Nanda 2 , Intan Adino 3 1) Akuntansi,," Wahyu, Agung Minto. 2019. "Manajemen BUMDes Berbasis Ekonomi Kreatif." (July).
- Wibowo, Agus. 2020. "The Development of Regionally Owned Enterprises (BUMD) in Indonesia." 140(23): 460–63.

Zaenuri, Muchamad, Muhammad Eko Atmojo, and Muhammad Iqbal. 2019. "Penataan Kelembagaan Bumdes Berbasis." *Abdimas Altruus : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(2): 28–36.

Zamzami, Faiz et al. 2020. "Pengembangan Aplikasi Pelaporan Keuangan BUMD Berbasis Android." (March).